



BAPPENAS



SEMINAR AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2011

PROVINSI BENGKULU

UNIVERSITAS BENGKULU

Oleh : Benardin,SE,MT



Hotel Santika Premier Jakarta, 10-11 November 2011

KOMPONEN EVALUASI



Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional
2010 dan 2011 Berdasarkan
RPJMN 2010 - 2014

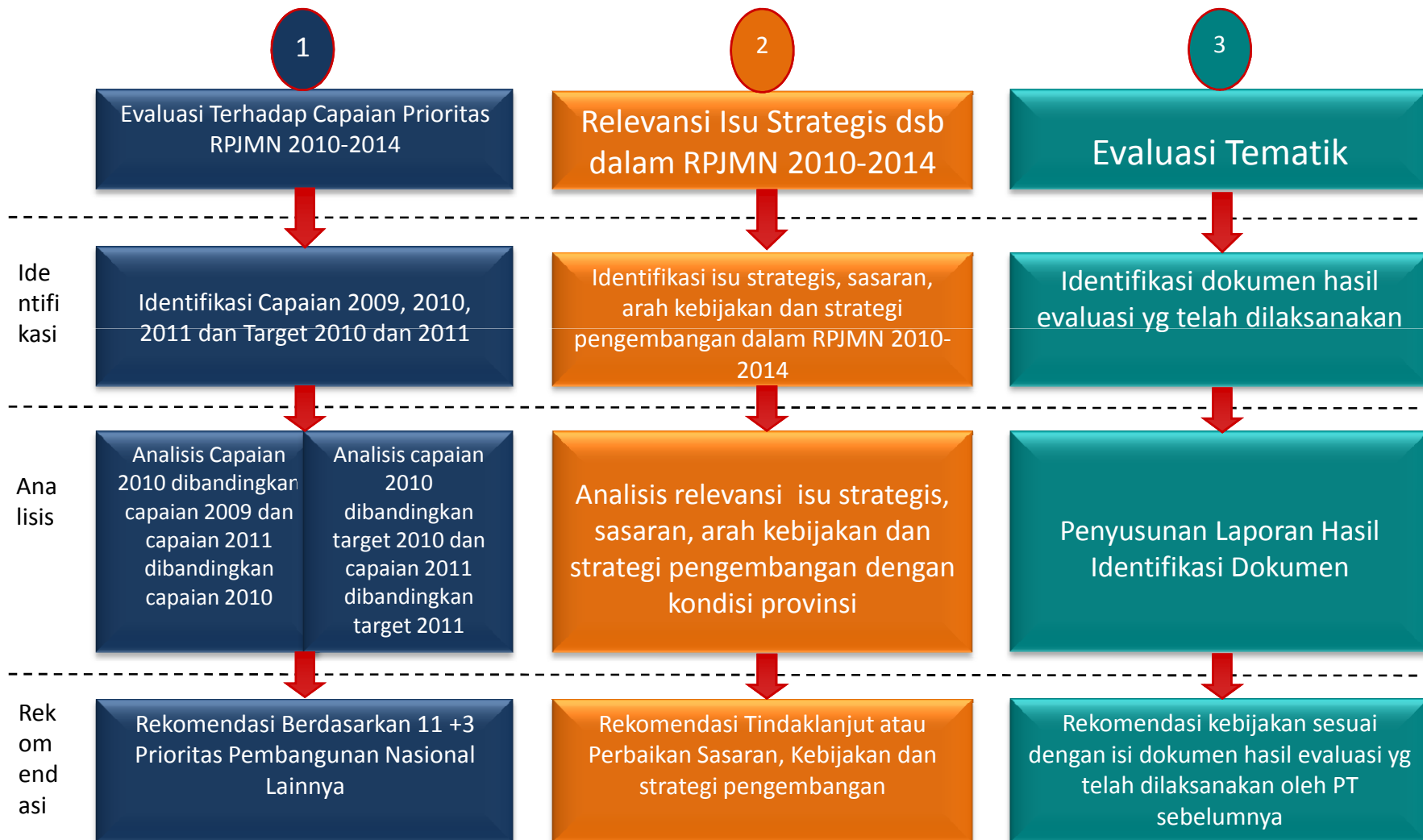


Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan
dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-
2014



Evaluasi Tematik

KERANGKA EVALUASI



1

**Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas
Pembangunan Sampai dengan 2010 Dan 2011
Sesuai dengan RPJMN 2010-2014**

INDIKATOR EVALUASI

No	Prioritas Nasional	Indikator	2009	2010	2011
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan	43.24	83.92	
		Persentase kab/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap	80.00	90.00	
		Persentase kab/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	20.00	30.00	
		Persentase kab/kota yang telah memiliki e-procurement		20.00	100
		Persentase kab/kota yang telah memiliki Perda Transparansi	0	0	0

ANALISIS

- Jumlah kasus yang dilaporkan di provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan, namun persentase penanganan kasus korupsi yang disidangkan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi, turun drastis pada tahun 2009 (kinerja aparat hukum turun) dan meningkatkan tajam pada tahun 2010. Kinerja aparat hukum dalam penanganan kasus korupsi di provinsi Bengkulu masih berada di bawah penanganan kasus korupsi di tingkat nasional.
- Pemerintah kabupaten kota dalam provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada publik, mengefektifkan dan mengefisiensikan tata kelola birokrasi. Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut terlihat dari peningkatan jumlah kabupaten kota yang memiliki perda pelayanan satu atap dalam tiga tahun terakhir. Dari sepuluh kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu 80 % tahun 2009 telah memiliki perda pelayanan satu atap dengan pengisian struktur kelembagaannya, kemudian meningkat menjadi 90 % pada tahun 2010 dan tahun 2011. Hal ini berarti di provinsi Bengkulu telah terjadi peningkatan pelayanan publik dalam bentuk pelayanan perizinan dan pemangkasan birokrasi dengan biaya tinggi dalam tiga tahun terakhir.
- Dalam aspek keuangan daerah, berdasarkan pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah, pemerintah kabupaten kota dalam provinsi Bengkulu masih belum menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Bengkulu masih banyak pemerintah kabupaten kota yang mendapat penilaian kinerja keuangan LKPD dengan predikat wajar dengan pengecualian (WDP). Berdasarkan Kinerja keuangan LKPD kabupaten kota di provinsi Bengkulu menunjukan dua kabupaten yang meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2009, dan meningkat menjadi tiga kabupaten mendapat predikat WTP dalam tahun 2010.
- Dalam bidang pengadaan barang dan jasa melalui elektronik (e-Procurement) sebagai media pengadaan barang dan jasa untuk provinsi Bengkulu termasuk kabupaten kota belum menerapkan mekanisme teknologi informasi elektronika dalam proses pengadaan barang dan jasa. Demikian juga halnya dengan Perda Transparansi, berdasarkan penelusuran pada kabupaten kota yang ada di provinsi Bengkulu, ditemukan bahwa tidak ada satu kabupaten kota yang telah memiliki Perda Transparansi

No	Prioritas Nasional	Indikator	2009	2010	2011
2	Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	8,20 Tahun	8,20 Tahun	-
		Angka Partisipasi Murni (SD/MI)	94,98 %	95,53 %	-
		Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)	110,46 %	112,83 %	-
		Angka melek aksara 15 tahun keatas	94,90 %	95.30	-
3	Kesehatan	Angka Kematian Bayi	21,14 per 1000 kelahiran hidup	27, 49 per 1000 kelahiran hidup	-
		Angka Harapan Hidup	70,30 Tahun	70,50 Tahun	-
		Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)	85,50 %	89,89 %	-
		Laju pertumbuhan penduduk	1,52 %	1,67 %	-
4	Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penduduk miskin	18,59 %	18,30 %	17,50 %
		Tingkat pengangguran terbuka	5,31 %	4,59 %	3,41 %

ANALISIS

- Tingkat pendidikan di provinsi Bengkulu masih tergolong rendah atau setingkat SLTP, dan belum ada peningkatan capaian rata rata lama sekolah dari tahun 2009 sampai tahun 2010 yakni berturut turut sebesar 8,2 tahun. Rata-rata lama pendidikan ini juga merupakan refleksi tingkat produktivitas tenaga kerja di provinsi Bengkulu.
- Angka partisipasi murni (SD/MI) di provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari 94,98 % tahun 2009 menjadi 95,53 % tahun 2010 (melampaui rata-rata nasional 94,37 %) , namun masih terdapat 4 – 5 % anak usia sekolah (7 – 13 tahun) jenjang SD/MI yang belum dapat mengakses pendidikan dasar.
- Berdasarkan angka partisipasi kasar SD/MI (APK) provinsi Bengkulu terlihat mengalami peningkatan yakni sebesar 110,46 % tahun 2009 dan menjadi 112,83 % pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa baik yang berumur di bawah 7 tahun atau di atas 12 tahun yang sedang bersekolah pada tingkat SD/MI mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
- Angka melek aksara usia 15 tahun keatas di provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir yaitu 94,90 % pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 95,30 % pada tahun 2010. Hal ini berarti masih ada penduduk usia 15 tahun ke atas di provinsi Bengkulu kira kira 5 % tidak melek aksara (buta aksara).
- Angka kematian bayi (umur di bawah satu tahun) per 1000 kelahiran hidup sampai tahun 2009 mengalami penurunan, sekaligus mencerminkan keberhasilan bidang kesehatan dan ekonomi masyarakat. Namun pada tahun 2010 angka kematian bayi di provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yakni dari 21,14 % tahun 2009 menjadi 27,49 % per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Hal ini berarti telah terjadi penurunan tingkat kesehatan ibu dan bayi, gizi, penyakit, kondisi prenatal, bahkan ekonomi masyarakat di provinsi Bengkulu.

- Angka persentase penduduk yang ber KB juga mengalami peningkatan , pada tahun 2009 persentase penduduk ber KB sebesar 85,50 % meningkat menjadi 89,89 % pada tahun 2010. Angka persentase penduduk ber KB menunjukkan penurunan tingkat kelahiran dan meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak. Hal ini juga merefleksi penurunan pertumbuhan penduduk alami.
- Laju pertumbuhan penduduk provinsi Bengkulu tahun 2009 sebesar 1,52 % dan meningkat 1,67 % pada tahun 2010. Secara nominal jumlah penduduk provinsi Bengkulu meningkat dari 1.666.900 pada tahun 2009 meningkat menjadi 1.715.500 tahun 2010 jiwa. Hal ini dapat disebabkan secara signifikan oleh migrasi masuk ke provinsi Bengkulu yang makin meningkat.
- Perkembangan persentase penduduk miskin di provinsi Bengkulu hingga tahun 2008 mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2008 sampai tahun 2009 persentase penduduk miskin mengalami penurunan hingga tahun 2010 terus mengalami penurunan menjadi 18,30 %. Hal ini memberi makna bahwa program penanggulangan kemiskinan di provinsi Bengkulu relatif berhasil. Dengan kata lain, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan.
- Demikian juga halnya dengan tingkat pengangguran terbuka sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, dimana tingkat pengangguran di provinsi Bengkulu menurun dari 5,31 % pada tahun 2009 menjadi 4,59 % pada tahun 2010. Pengangguran terbuka di provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa semakin besar jumlah angkatan kerja yang bekerja di atas 40 jam per minggu,. Dengan kata lain, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja yang telah mendapat pekerjaan
- Angka harapan hidup provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari 70,30 tahun pada tahun 2009 menjadi 70,50 tahun pada tahun 2010. Peningkatan usia harapan hidup merefleksikan membaiknya tingkat dan derajat kesehatan dan tingkat ekonomi masyarakat di provinsi Bengkulu. Dengan kata lain, menunjukkan keberhasilan pembangunan program bidang kesehatan masyarakat terutama di pedesaan (puskesmas, JPS, posyandu, kesehatan lingkungan dan lain lain).

No	Prioritas Nasional	Indikator		2009	2010	2011
5	Ketahanan Pangan	PDRB Sektor Pertanian		2.942.678	3.051.271	3.191.672*)
		Nilai Tukar Petani		111.21	106.16	104.04*)
		Produksi Padi		510.162	516.868	521.534*)
		Jumlah Penyuluh Pertanian		512	572	662*)**)
6	Infrastruktur	% panjang jalan nasional dalam kondisi:	Baik	38,26	54,55	
			Sedang	31,39	29,21	
			Buruk	30,36	16,24	
		Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana/Provinsi		1.001	1.253	735
		Perda RTRW Provinsi				
		Persentase kab/kota yang telah mensahkan Perda RTRW		6	6	
7	Iklim Investasi dan Iklim Usaha	Persentase kredit UMKM				Rp 2.638.430 Juta
		Nilai Realisasi Investasi PMA		US \$ 25,1 juta		US \$ 26,0 Juta
		Nilai Realisasi Investasi PMDN		Rp. 8,5 M	341.126.504.160	
		Jumlah alokasi kredit perbankan		Rp. 13.287.745		Rp. 5.591.190 juta
		Jumlah tabungan masyarakat		Rp. 4.631.010		11.182.380

ANALISIS

- Struktur ekonomi provinsi Bengkulu masih didominasi oleh sektor pertanian, dan peranan sektor pertanian juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Peningkatan peranan sektor pertanian sejalan dengan peningkatan nilai tukar petani tahun 2009 dan tahun 2010 dan sejalan dengan peningkatan produksi padi di provinsi Bengkulu dalam tiga tahun terakhir. Khusus pada tahun 2011 telah terjadi penurunan nilai tukar petani dari 104,68 pada tahun 2010 menjadi 101,17 pada tahun 2011. Hal ini berarti terjadi penurunan kesejahteraan petani atau meningkatnya beban ekonomi petani di pedesaan.
- Indikator Infrastruktur yang ditunjukkan dengan persentase panjang jalan nasional, sedikit mengalami perbaikan, panjang dalam kondisi baik hanya 54,55% pada tahun 2010, dan masih terdapat jalan dalam kondisi buruk 16,24%.
- Alokasi kredit untuk UMKM mengalami kenaikan, sampai dengan bulan Agustus 2011 sebesar Rp.2.638.430,13 juta
- Iklim Investasi dan Iklim Usaha yang ditunjukkan dengan nilai PMDN dan PMA tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun jumlah tabungan masyarakat mengalami peningkatan

No	Prioritas Nasional	Indikator	2009	2010	2011
8	Energi	Rasio Elektrifikasi	51.46	52.10	52.73
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis	0,621	0,696	-
		Frekuensi terjadi bencana	1	2	-
		Persentase ruang terbuka hijau (RTH) di Ibukota Provinsi	-	-	5
		Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi	80	80	90

- Perkembangan *Rasio Elektrifikasi* penduduk Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yaitu sekitar 51.46% pada tahun 2009, meningkat sedikit menjadi 52.10% pada tahun 2010, dan meningkat lagi menjadi 52.73% pada tahun 2010.
- Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis mengalami kenaikan, dari 0,621 % tahun 2009 menjadi 0,696 tahun 2010
- Persentase pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/provinsi meningkat 80% menjadi 90% tahun 2010

No	Prioritas Nasional	Indikator	2009	2010	2011
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik	Indeks Gini	0,30	0,37	-
		Jumlah Kabupaten Tertinggal	6	6	6
		Kemiskinan	18,59%	324,93 (18,30%)	303,61 (17,50%)
11	Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi	Jumlah paten (HAKI)	-	-	-
		Jumlah dosen peneliti PTN/PTS	1568	-	-
		Jumlah perpustakaan	2	2	2
		Jumlah hasil riset dari lembaga riset	-	-	-

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik

- Kinerja dalam bidang ini tidak mengalami perbaikan yang signifikan karena ketimpangan pendapatan masyarakat makin meningkat dari 0,3 tahun 2009 menjadi 0,37 tahun 2010 yang menempatkan provinsi Bengkulu pada urutan tertinggi di pulau Sumatera.
- Jumlah kabupaten tertinggal lebih dari 50%
- Angka kemiskinan masih tinggi (17,50%) meskipun sudah mengalami penurunan.

No	Prioritas Nasional	Indikator	2009	2010	2011
Prioritas Lainnya					
1	Kesejahteraan rakyat	IPM	72,55	73,53	74,00
		Pendapatan per kapita	9,60	10,34-11,14	11,14-11,93
		Penyandang masalah sosial	32.598	-	-
		Gizi Buruk	0,02	-	-
2	Politik, Hukum, dan Keamanan	Indeks kriminalitas	-	-	-
		Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional	92,27	82,26	-
		Persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional	73,33	100,00	-
3	Perekonomian	Pertumbuhan ekonomi	5,58	6,02	-
		Inflasi	13,44	9,08	1%
		Perkembangan PAD	413570,042,373	442.804,450,372	487.084.895,409
		Pertumbuhan Ekspor	- 26,48%	66,74%	23,66%
		Pertumbuhan Impor		492,22%	84,09

Kesejahteraan rakyat

- Kesejahteraan rakyat di Prov.Bengkulu mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan indikator :
- Meningkatnya IPM (71,76 tahun 2009) ranking 12 nasional,
- Meningkatnya Pendapatan perkapita mencapai Rp.10,527 juta atau naik10,2%,
- Berkurang jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 17,50 % pada tahun 2010.
- Jumlah penderita gizi buruk terus berkurang

2

**Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Dalam
RPJMN 2010-2014**

Analisis Relevansi Isu Strategis RPJMN dengan RKPD 2010 dan 2011

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah</p> <p>Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara wilayah ataupun nasional di antaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman pangan dan hortikultura. Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih relatif kecil bagi wilayah penghasilnya karena belum berkembangnya mata rantai industri pengolahan. Bentang Alam wilayah Sumatera yang memiliki keindahan alam yang sangat potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional. Jika mengingat lokasi geografisnya yang sangat strategis, pengembangan sektor dan komoditas tersebut berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan nasional dalam kerangka perekonomian regional ASEAN yang semakin terintegrasi.</p>	<p>Produktivitas dan nilai tambah pertanian dalam arti luas untuk provinsi Bengkulu memang masih rendah dan kecil. Hal ini dikarenakan mata rantai industri pengolahan belum berkembang dengan baik sehingga menimbulkan dampak terhadap rendahnya pendapatan petani. Produktivitas yang rendah merupakan akibat dari rendahnya sumber daya manusia terutama di pedesaan sehingga adopsi teknologi pasca panen menjadi lambat dan pada gilirannya mengakibatkan rendahnya daya saing produk dan pendapatan. Selain itu, petani juga dihadapkan pada persoalan kekurangan modal, kurangnya pembinaan dan terbatasnya perhatian pemerintah daerah terhadap aksesibilitas baik pada sentra produksi maupun lintas regional. Sehingga petani di pedesaan sulit keluar dari lingkaran setan ekonomi itu.</p> <p>Pengembangan pariwisata di provinsi Bengkulu baru mulai digerakan dan terus akan dikembangkan akan tetapi masih banyak menemui kendala dalam faktor penunjang pariwisata sehingga wisnu dan wisman belum tertarik untuk datang ke Bengkulu sebagai tujuan wisata</p>

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal</p> <p>Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, seringkali terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Sumatera sebagai pusat pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu wilayah.</p>	<p>Keterbatasan sumber daya listrik di provinsi Bengkulu menjadi masalah yang sangat serius. Pemadaman secara bergilir masih sering dirasakan oleh masyarakat di kabupaten bahkan di kota Bengkulu sendiri masih sering dirasakan pemadaman. Sehingga mengakibatkan daya dukung industri ekonomi lokal menjadi kurang berkembang. Kondisi kelistrikan ini juga mengakibatkan kurangnya minat investor menanamkan modalnya di provinsi Bengkulu. Sistem integrasi wilayah kelistrikan Sumatera inter koneksi mutlak diperlukan untuk mengatasi kekurangan pasokan di provinsi Bengkulu sehingga pada gilirannya dapat menopang perkembangan industri lokal</p>

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah</p> <p>Keragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi provinsi di wilayah Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan menghasilkan sinergi pengembangan industri unggulan wilayah. Untuk itu, dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat strategis. Kondisi saat ni menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera serta belum berkernbangnya integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, laut, dan udara.</p>	<p>Kondisi Jaringan transportasi darat antar kabupaten dalam provinsi Bengkulu masih mengalami kerusakan berat sehingga mengakibatkan lamanya waktu tempuh dan biaya tinggi dalam perdagangan intra regional (antar kabupaten). Demikian juga halnya kerusakan jaringan transportasi darat antar provinsi, terutama jalur lintas Sumatera pantai barat melalui provinsi Bengkulu dan jalur transportasi provinsi Bengkulu menuju Palembang dan Jambi yang belum menunjukkan optimalisasi kapasitas jaringan sehingga belum memberikan dorongan yang signifikan dalam mobilitas arus perdagangan inter regional (antar provinsi)</p> <p>Integrasi jaringan transportasi intermoda juga tidak terjadi untuk wilayah Bengkulu dengan provinsi tetangga seperti jaringan transportasi kereta api, kapal laut, sungai dan udara. Hal ini mengakibatkan keragaman perdagangan dari provinsi Bengkulu menuju daeah tetangga mengalami biaya tingi sehingga berimpas kepada rendahnya pendapatan</p>

RPJMN 2010-2014

Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan

Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian nasional setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah pengembangan ke depan sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa, dukungan kualitas sumber daya manusia yang unggul menjadi sangat strategis. Seiring dengan transformasi struktural perekonomian wilayah, kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak lagi sekadar bersaing di tingkat nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN bahkan global. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan berat, terkait masih tingginya tingkat kemiskinan di beberapa provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga miskin merupakan isu strategis yang saling melengkapi

Analisis Relevansi

Kualitas tenaga kerja merupakan cerminan output dari proses pendidikan manusia yang sehat baik diperoleh dari sekolah formal maupun sekolah non formal. Kualitas tenaga kerja, angkatan kerja yang sehat merupakan salah satu faktor dominan dalam proses produksi sehingga mampu mendorong kualitas dan daya saing produksi industri di daerah. Pengembangan sumber daya manusia di provinsi Bengkulu dimulai dari peningkatan pendidikan formal, non formal, pendidikan sekolah dan luar sekolah sampai dengan kesehatan manusia. Peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pendidikan terus ditingkatkan. Demikian juga halnya, dalam bidang kesehatan bahwa kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi isu sentral di provinsi Bengkulu. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, puskesmas, alkes, obat, dll), peningkatan kualitas tenaga medis dan non medis, anggaran kesehatan dan kesehatan lingkungan merupakan isu strategis saling melengkapi

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Kualitas birokrasi dan tata kelola</p> <p>Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik dan daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, investasi di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi akan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui menurunnya biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga miskin dalam mengakses pelayanan publik.</p>	<p>Kinerja aparatur pemerintah daerah yang baik merupakan refleksi dari pelaksanaan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan daerah yang baik (good government). Kebijakan, tata kelola dan kualitas birokrasi yang baik dan transparan dapat mendorong tumbuh kembangnya investasi di daerah, meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah dan menekan biaya industri sehingga pada gilirannya memberikan kesempatan kerja, mengurangi rumahtangga miskin dan mengurangi pengangguran.</p> <p>Kinerja yang baik dari aparatur pemerintah sebagai agen pembangunan dapat pula membangkitkan kepercayaan publik dalam mengakses layanan pemerintahan khususnya layanan publik bagi masyarakat miskin yang selama ini masih enggan berurusan dengan pemerintah daerah.</p>

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil</p> <p>Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan lain. Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan. Tantangan utama dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara adalah kesenjangan tingkat kesejahteraan dengan wilayah negara tetangga.</p>	<p>Provinsi Bengkulu yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, mempunyai beberapa pulau kecil baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Tidak menutup kemungkinan terjadi ilegal pelayaran, penyelundupan, dan pencurian ikan dalam ZEE 200 mil, mengingat fasilitas armada yang dimiliki pemda dan Lanal Bengkulu relatif kurang memadai. Disamping itu, sebagai salah satu pertahanan laut di sepanjang pantai pulau Sumatera, posisi provinsi Bengkulu sudah semestinya menjadi perhatian nasional sebagai basis pertahanan dan keamanan laut di pantai barat pulau Sumatera.</p>

RPJMN 2010-2014

Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam mencari keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di sepanjang pesisir barat wilayah Sumatera. Potensi gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 dan di Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi perekonomian wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan.

Analisis Relevansi

Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah rawan gempa di Indonesia telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran baik kepada masyarakatnya maupun kepada pemerintah daerahnya. Kerugian harta benda, dan jiwa memberika pelajaran berharga kepada stake holder di provinsi Bengkulu. Namun jika diamati secara mendalam ternyata belum cukup membuat pemerintah daerah dan masyarakat betul betul sadar akan bahaya dari bencana alam tersebut. Hal ini dapat terlihat dari kurang seriusnya pemerintah daerah mengantisipasi bencana alam itu sendiri dan penanganan pasca bencana alam tersebut. Misalnya terkait dengan sistem peringatan dini, akses penyelamatan, bimbingan dan petunjuk penyelamatan, dan lain lain dilaksanakan dengan tidak memadai.

Pada sisi lain, kita bisa melihat bagaimana masyarakat di kawasan hutan, di kawasan sungai, danau, pantai, sering memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan melebihi daya dukungnya sehingga tidak jarang menimbulkan kebakaran, huta, abrasi, dan banjir yang menimbulkan kerugian bagi kita semua.

RPJMN 2010-2014

Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam mencari keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di sepanjang pesisir barat wilayah Sumatera. Potensi gempa bumi juga diikuti potensi terjadinya bencana tsunami. Kejadian bencana di Provinsi NAD pada akhir tahun 2004 dan di Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan yang luas bagi perekonomian wilayah. Di sisi lain, bencana alam juga dapat diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir bandang dan kebakaran hutan.

Analisis Relevansi

Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah rawan gempa di Indonesia telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran baik kepada masyarakatnya maupun kepada pemerintah daerahnya. Kerugian harta benda, dan jiwa memberika pelajaran berharga kepada stake holder di provinsi Bengkulu. Namun jika diamati secara mendalam ternyata belum cukup membuat pemerintah daerah dan masyarakat betul betul sadar akan bahaya dari bencana alam tersebut. Hal ini dapat terlihat dari kurang seriusnya pemerintah daerah mengantisipasi bencana alam itu sendiri dan penanganan pasca bencana alam tersebut. Misalnya terkait dengan sistem peringatan dini, akses penyelamatan, bimbingan dan petunjuk penyelamatan, dan lain lain dilaksanakan dengan tidak memadai.

Pada sisi lain, kita bisa melihat bagaimana masyarakat di kawasan hutan, di kawasan sungai, danau, pantai, sering memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan melebihi daya dukungnya sehingga tidak jarang menimbulkan kebakaran, huta, abrasi, dan banjir yang menimbulkan kerugian bagi kita semua.

Rekomendasi

Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan dengan mengembangkan mata rantai industri pengolahannya 2. Intergrasi kawasan pariwisata pantai barat dan kawasan timur sumatera • Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas 2. Mempermudah prosedur Birokrasi dan perizinan serta insentif kepada investor masuk 3. Promosi sumber daya Pertanian dalam arti luas 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani 5. Pembinaan petani yang lebih efektif termasuk pendanaan 6. Peningkatan dan pengembangan objek wisata serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> 1. Lambatnya implementasi pemasokan listrik dan jaringan infrastruktur listrik Sumatera Inter koneksi • Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumber daya listrik (pembangkit tenaga listrik kapasitas menengah kecil) di kabupaten sesuai dengan potensi pembangkit listrik lokal yang dimiliki (seperti mikro hidro, kincir, tenaga surya, dinamo, tenaga diesel dan lain lain) 2. Mengembangkan sumber daya pembangkit listrik alternatif
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan provinsi Bengkulu sebagai salah satu simpul jaringan transportasi intermoda wilayah Sumatera 2. Meningkatkan kapasitas jaringan transporasi darat lintas sumatera jalur pantai barat melalui provinsi Bengkulu • Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas jaringan transporasi darat antar kabupaten dalam provinsi Bengkulu 2. Meningkatkan cakupan layanan transportasi, kualitas infrastruktur transportasi darat hingga menuju sentra-sentra produksi dan sentra industri. 3. Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan antar kabupaten/kota dalam provinsi Bengkulu 4. Penegakan peraturan secara tegas terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas muatan

Rekomendasi

- **Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah**

1. Kualitas sumber daya manusia, dan tenaga kerja menjadi isu strategis dalam upaya mendukung pengembangan industri, untuk itu perlu mengkaji ulang sistem pendidikan nasional yang berorientasi prestasi semu, mahal, dan memupuk ketidak jujuran nilai nilai.
2. Peningkatan kualitas, kapasitas pelayanan, kualitas tenaga medis sarana dan prasarana kesehatan serta anggaran kesehatan.
3. Memperluas fakultas kedokteran dengan biaya murah guna menuju 1 dokter satu desa

- **Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi**

1. Pemerataan kesempatan dan akses pendidikan baik formal maupun non formal termasuk kejuruan yang bermutu
2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan pendidik
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang murah
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan
6. Meningkatkan kualitas tenaga medis dan non medis

Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah

1. Kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tata kelola pemerintah yang bersih, jujur, transparan, dan bebas KKN. Implementasi dari manajemen pemerintah yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang baik (good government) masih menjadi bahan diskusi, dan bahan olok olok belaka. Lemahnya pelaksanaan manajemen pemerintahan, yang kaya peraturan tapi miskin pelaksanaan ini masih merupakan isustrategis yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dicari solusinya.

- **Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi**

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntable
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

- **Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah**

1. Memperkuat pertahanan laut pantai barat Sumatera, dengan menjadikan provinsi Bengkulu sebagai salah satu pertahanan dan keamanan laut yang terpenting sehingga perlu meningkatkan sarana dan prasarana Armada

- **Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi**

1. Meningkatkan keamanan laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil
2. Pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat pulau Enggano sebagai satu-satunya pulau yang berpenghuni dalam wilayah provinsi Bengkulu sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki

Rekomendasi

- **Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah**

1. Memperkuat pertahanan laut pantai barat Sumatera, dengan menjadikan provinsi Bengkulu sebagai salah satu pertahanan dan keamanan laut yang terpenting sehingga perlu meningkatkan sarana dan prasarana Armada

- **Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi**

1. Meningkatkan keamanan laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil
2. Pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkat kesejahteraan masyarakat pulau Enggano sebagai satu-satunya pulau yang berpenghuni dalam wilayah provinsi Bengkulu sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki

Rekomendasi Isu Strategis ke Pemerintah

1. Optimalisasi sumberdaya alam yang melestarikan lingkungan yang didukung dengan penegakan peraturan secara tegas
2. Manajemen penanganan pasca gempa sudah saatnya menggunakan manajemen hati, bukan manajemen logika

- **Rekomendasi Isu Startegis ke Pemerintah Provinsi**

1. Meningkatkan kinerja penanganan bencana alam sejak dini sampai dengan pasca bencana
2. Meningkatkan sarana dan prasarana antisipatif bencana terutama gempa bumi, dan banjir
3. Meningkatkan bimbingan kepada masyarakat tentang antisipasi dan penyelamatan diri jika terjadi bencana alam.

Analisis Relevansi Sasaran RPJMN dengan RKPD 2010 dan 2011

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita; meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera,</p>	<p>Standar hidup masyarakat dapat tercermin dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Tingginya rata rata tingkat pendidikan dan kesehatan dapat pula memberi makna rendahnya kemiskinan dan rendahnya angka kematian pada masyarakat tersebut. Membrantas kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan harapan hidup dapat diawali dengan memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan produksi daerah, produktivitas, dan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, faktor pendidikan dan kesehatan memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah baik dalam konteks mengejar pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas sektoral (pertanian, industri, pertambangan,dll), meningkatkan pendapatan, kesejahteraan masyarakat, IPTEK, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan, serta meningkatkan harapan hidup masyarakat.</p> <p>Disamping itu, faktor pendidikan dan kesehatan dapat pula menunjang kinerja aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai agen pembangunan dengan tingkat pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik tentu akan mampu menjalankan tugas tugas pembangunan dengan baik pula, dan mampu mengemban tata kelola pemerintah yang bersih dan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.</p> <p>Bahkan faktor pendidikan dan kesehatan dapat pula kontribusi dalam mengembangkan potensi potensi sosial budaya dan adat istiadat yang dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan daerah.</p>

RPJMN 2010-2014

Berkembangnya Jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;

Analisis Relevansi

Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di kawasan Sumatera khususnya antar provinsi di Sumatera bagian selatan dan pesisir barat akan berimplikasi kepada mobilitas orang dan barang antar provinsi sehingga dapat meningkatkan perdagangan antar daerah. Selain itu, berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi akan menciptakan efisiensi internal pada transportasi karena meningkatnya skala ekonomis dalam transportasi tersebut, sehingga akan mendorong daya saing produk yang tinggi yang pada gilirannya meningkatkan skala ekonomi usaha daerah

RPJMN 2010-2014

Berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;

Analisis Relevansi

Sektor pertanian tanaman pangan khususnya padi sebagai makanan pokok masih sangat relevan untuk dikembangkan di Sumatera bagian Selatan mengingat wilayah ini masih mempunyai potensi lahan persawahan dan potensi irigasi yang cukup luas untuk dikembangkan. Ketahanan pangan akan menjamin stok beras nasional dan mengurangi impor beras nasional. Untuk itu pilihan Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan menjadi kebijakan yang penting dilaksanakan.

Disamping itu, Sumatera bagian selatan relatif kaya akan sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, air, dan lain lain, oleh karena itu optimalisasi pemanfaatan harus diutamakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

RPJMN 2010-2014

Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai.

Analisis Relevansi

Ketimpangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adanya. Fakta menunjukkan bahwa wilayah Sumatera bagian utara dan bagian selatan lebih maju pembangunan ekonominya dibandingkan dengan wilayah di pesisir pantai Sumatera, terutama pesisir pantai barat. Ketimpangan pembangunan antar wilayah ini berimplikasi kepada ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan antar wilayah. Oleh sebab itu, intervensi pemerintah untuk menjaga keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir merupakan langkah kebijakan yang sangat penting untuk dilaksanakan

Rekomendasi	
Sasaran ke Pemerintah	
1.	Meningkatnya kesejahteraan dan standar hidup masyarakat Sumatera secara nyata tidak saja ditunjukkan oleh indikator pembangunan dan indikator ekonomi tetapi lebih kepada pemerataan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan. Dengan kata lain memperkecil ketimpangan dan kesenjangan kesejahteraan masyarakat baik kesenjangan antar individu maupun kesenjangan antar daerah di Sumatera.
2.	Optimalisasi sumber daya alam, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, IPM, harapan hidup, akan membawa pengaruh terhadap peningkatan produktivitas sektoral (seperti pertanian dalam artian luas, pertambangan, dan industri, dll) yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berorientasi kepada pemerataan.
Sasaran ke pemerintah Provinsi	
1.	Meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja melalui indikator-indikator kesehatan dan pendidikan sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan inovasi di tengah masyarakat dengan harapan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
2.	Optimalisasi produksi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri yang berorientasi pada peningkatan pendapatan dan pemerataan masih perlu menjadi sasaran pembangunan pada tahun-tahun ke depan
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi ke Pemerintah 	
1.	Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera, khususnya kawasan Sumatra bagian Selatan, dan pantai barat Sumatera
2.	Meningkatnya integrasi antar moda, darat, laut, dan udara di kawasan Sumatera, khususnya Sumatera bagian Selatan, dan pesisir barat pantai Sumatera
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi 	
1.	Berkembangnya jaringan yang berkualitas standar dan meningkatnya transportasi antar kabupaten dalam wilayah provinsi Bengkulu
2.	Meningkatnya pemeliharaan jaringan jalan dan pengawasan transportasi antar kabupaten dalam wilayah provinsi Bengkulu
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi ke Pemerintah 	
1.	Berkembangnya Sumatera bagian Selatan sebagai salah satu lumbung padi dan energi nasional
2.	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber energi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi	
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan (padi & palawija) upaya meningkatkan ketahanan pangan di provinsi Bengkulu
2.	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (batu bara, air, dll) sebagai sumber energi yang ramah lingkungan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu
<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi ke Pemerintah 	
Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai, dengan akselerasi pembangunan pesisir pantai Sumatera	
Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi	
1.	Meningkatkan perekonomian masyarakat provinsi Bengkulu dengan mengembangkan, membina usaha-usaha sektor unggulan yang berdaya saing.
2.	Mengembangkan industri pengolahan sesuai dengan karakteristik daerah (seperti pertanian dan perikanan)
3.	Meningkatkan kerjasama pasar regional antar Sumatera bagian utara, bagian selatan dan pesisir.

Rekomendasi	
<p style="text-align: center;">• Rekomendasi ke Pemerintah</p> <p>Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan diarahkan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan meningkatkan produktivitas sektor perkebunan sawit, dan karet, serta mendorong tumbuhnya investasi terhadap industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan</p>	
<p>• Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi</p> <p>Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan sawit, dan karet, di provinsi Bengkulu, diarahkan pada peningkatan produktivitas, peningkatan investasi sektor pertanian dan sektor perkebunan guna meningkatkan nilai tambah dengan menumbuhkembangkan industri pengolahan sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat</p> <p>Revitalisasi pertanian dan perkebunan diarahkan pada peningkatan daya saing yang dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan sektor pertanian, dan perkebunan</p>	
<p style="text-align: center;">• Rekomendasi ke Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi perikanan dan hasil laut sangat perlu dilakukan sebagai langkah upaya pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut terutama di kawasan pesisir. Pendekatan pengembangan sentra produksi dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan hasil laut, dan meningkatkan daya saing industri pengolahan hasil perikanan dan hasil laut 2. Pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas dan peningkatan penghasilan nelayan. <p>Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi</p> <p>Arah pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut di provinsi Bengkulu dilakukan dengan strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut 2. Meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan industri pengolahan perikanan dan hasil laut, yang berdaya saing dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dan produktivitas nelayan 	
<p style="text-align: center;">• Rekomendasi ke Pemerintah</p> <p>Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara yang ramah lingkungan</p> <p>Mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan</p> <p>• Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi</p> <p>Dalam upaya mendukung Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional, provinsi Bengkulu melakukan strategi meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dengan meningkatkan produksi batu bara yang ramah lingkungan, dan pemanfaatan air sebagai sumber energi.</p> <p>Mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.</p> <p>Pengendalian kerusakan lingkungan dan pengurangan dampak negatif</p>	
<p style="text-align: center;">• Rekomendasi ke Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dalam wilayah Sumatera bagian selatan dan barat dengan strategi mengembangkan Bengkulu, Palembang, dan Padang sebagai pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu <p>• Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi</p> <p>Dalam rangka mengembangkan objek wisata yang terintegritas dan terpadu, provinsi Bengkulu, disarankan melakukan arah pengembangan sektor pariwisata dengan strategi :</p> <p>Meningkatkan pengembangan objek objek wisata alam (pantai, gunung, air terjun, berburu, rafflesia, cagar alam, hutan raya, dll) dan objek wisata budaya dan sejarah (Tabot, Benteng Inggris) yang terintegritas dengan faktor pendukung pariwisata (akomodasi, transportasi, biro perjalanan, dan souvenir</p> <p>Mengembangkan pusat pusat wisata dalam provinsi Bengkulu dalam satu jalur wisata yang terpadu</p> <p>Meningkatkan promosi pariwisata dan kerja sama antar daerah dalam paket wisata dengan jalur antar daerah yang terintegritas.</p>	

Rekomendasi ke Pemerintah

Pengembangan ketenalistrikan di pulau Sumatera dilakukan dengan strategi:

1. Swastanisasi kelistrikan
2. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik
3. Menyelesaikan integrasi sistem jaringan listrik Sumatera inter koneksi
4. Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik

- **Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi**

Pengembangan ketenalistrikan di provinsi Bengkulu dilakukan dengan strategi:

Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air sebagai energi pembangkit listrik di kabupaten dan kecamatan

Mengembangkan sumber energi pembangkit listrik alternatif bagi pedesaan seperti Hidro mikro, diesel, kincir, dinamo, tenaga surya, dan lain lain

Swastanisasi kelistrikan

Rekomendasi ke Pemerintah

Percepatan dan efisiensi pembangunan kawasan wilayah Sumatera yang mempunya keterkaitan domestik dilakukan dengan strategi:

Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur;

Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut;

Meningkatkan kapasitas pelabuhan udara;

Mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai

- **Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi**

Penguatan keterkaitan domestik pembangunan pulau Sumatera yang terintegritas, provinsi Bengkulu melakukan strategi pengembangan pada :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan antar kabupaten yang bermutu
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan integritas antar moda transportasi darat, laut dan udara
3. Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut Pulau Baii, dan kapastas pelabuhan udara Fatmawati Bengkulu, dan Bandara Mukomuko

Rekomendasi ke Pemerintah

Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas angkatan kerja dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi :

Meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas

Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan berkualitas, dan murah khususnya kepada rumah tangga miskin

meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja.

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi :

Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan angkatan kerja dilakukan dengan strategi :

Peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan termasuk pendidikan non formal dan Paud

Penguatan manajemen pendidikan dasar, dan menengah serta kejuruan

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah

Peningkatan akses pelatihan dan ketrampilan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja

Meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah

Perbaikan status gizi masyarakat

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, serta puskesmas

Peningkatan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan

Rekomendasi ke Pemerintah

Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi

1. Memberi pengangguran pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan ketrampilan bagi pengangguran dan rumah tangga miskin sesuai dengan talenta masing masing

Rekomendasi ke Pemerintah

Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa

Meningkatkan kualitas legislasi sampai ke daerah

Meningkatkan penegakan hukum berkeadilan, HAM, dan pemberantasan KKN

Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur pemerintahan provinsi yang bersih, baik, dan berwibawa serta bebas KKN
2. Meningkatkan kualitas legislasi provinsi dan kabupaten
3. Meningkatkan penegakan hukum berkeadilan, HAM, dan pemberantasan KKN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel

Penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik

Analisis Relevansi Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan RPJMN dengan RKPD 2010 dan 2011

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikultura, sawit, dan karet;	Struktur ekonomi provinsi Bengkulu yang didominasi oleh sektor pertanian merupakan motor penggerak untuk menjadikan provinsi Bengkulu menuju sentra pertanian dan perkebunan. Dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura, dan sektor perkebunan khususnya kelapa sawit, dan karet dengan harapan provinsi Bengkulu dapat menjadi salah satu pusat produksi pertanian dan perkebunan, sekaligus menjadi pusat industri pengolahan hasil hasil pertanian dan perkebunan di Sumatera. Revitalisasi pertanian, menjamin ketersediaan pangan, peningkatan nilai tambah, dengan membangun industri rakyat berbasis kekuatan pertanian dan perkebunan makin ditingkatkan, sehingga dapat meningkatkan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan strategi rneningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut;</p>	<p>Sebagai kawasan pantai, provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah penghasil ikan di bagian barat pesisir pantai pulau Sumatera. Mata pencaharian masyarakat pesisir pantai barata Sumaetra umumnya nelayan. Oleh sebab itu, peningkatan produktivitas usaha perikanan dan hasil laut merupakan suatu pendekatan yang amat penting untuk dilakukan. Peningkatan sentra produksi perikanan dan hasil laut perlu dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas dan mengembangkan industri pengolahan perikanan dan hasil laut yang dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah, sehingga ada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir</p>
<p>Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara; b. mengembangkan sumber energi alternatif. 	<p>Optimalisasi produksi sumber daya alam minyak, gas,dan batubara dilakukan untuk pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara. Disamping itu, pengembangan sumber energi alternatif dilakukan untuk mendukung sumber daya alam yang sudah berkembang. Strategi pengembangan sumber daya alam minyak, gas, batu bara dan sumber energi alternatif tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan kata lain pegembangan sentra industri migas, gas, dan batubara yang ramah lingkungan.</p>

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu;</p>	<p>Pengembangan industri pariwisata, baik pariwisata alam maupun budaya membawa kontribusi positif terhadap perekonomian daerah, industri jasa di daerah, lapangan pekerjaan, dan pendapatan masyarakat. Pengembangan objek tujuan wisata, fasilitas penunjang antara lain akomodasi, transportasi, dan sosial budaya merupakan faktor yang tidak terpisahkan dalam paket strategi pengembangan sektor pariwisata.</p> <p>Pengembangan objek objek wisata yang ada di provinsi Bengkulu, seperti pantai, air terjun, gunung, peninggalan sejarah, raflesia arnoldi, cagar alam, berburu, dan objek budaya, harus dikemas dalam satu tujuan paket wisata yang terintegritas dan dalam satu jalur yang terpadu dengan objek wisata provinsi tetangga</p>
<p>Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik; b. mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik c. diversifikasi sumber energi pembangkit listrik. 	<p>Ketenagalistrikan masih menjadi masalah dalam menunjang perkembangan industri di daerah, demikian juga halnya dengan tenaga listrik di wilayah Sumatera dan terkhusus masalah kelistrikan di provinsi Bengkulu yang mengalami kekurangan pasokan. Terbatas sumber tenaga listrik, dan integrasi sistem jaringan Sumatera inter koneksi yang belum mampu memberikan pelayanan listrik yang optimal kepada semua lapisan masyarakat dapat menghambat pengembangan industri di daerah. Oleh sebab itu Pengembangan tenaga pembangkit dan sistem jaringan listrik terpadu merupakan kebijakan yang harus segera diselesaikan dalam mendorong tumbuhnya industri dan ekonomi di daerah</p>

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur; meningkatkan kapasitas pelabuhan laut; meningkatkan kapasitas pelabuhan udara; mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai. 	<p>Penguatan pembangunan pulau Sumatera dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan lintas provinsi dan inter moda yang terintegritas. Dengan integrasi pembangunan, seperti integrasi jaringan transportasi darat, sungai, dan integrasi intr moda transportasi darat, laut, udara dan sungai akan memberikan dampak positif terhadap keterkaitan produksi, meningkatkan efisiensi dalam mobilitas orang dan barang yang membawa kemajuan kawasan secara bersama sama.</p>
<p>Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin; meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja. 	<p>Kualitas sumber daya manusia dan kualitas angkatan kerja membawa pengaruh yang signifikan terhadap terhadap kualitas produksi, daya saing dan efisiensi industri pengolahan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan meningkatkan indikator pendidikan, dan indikator kesehatan. Oleh sebab itu, peningkatan aksesibilitas pendidikan, akses pelatihan ketrampilan dan akses kesehatan yang berkualitas menjadi penting untuk dilaksanakan. Disamping itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelatihan ketrampilan tenaga kerja merupakan langkah strategi yang perlu dilaksanakan pemerintah bersama sama dengan pemerintah daerah.</p>

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi</p> <p>Meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga miskin.</p>	<p>Kemiskinan bersumber dari pengangguran dan pendapatan yang kecil. Jika ingin membrantas kemiskinan beri mereka pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia. Tidak ada teori dan program yang patut didiskusikan kecuali memberi pengangguran pekerjaan dengan pendapatan yang cukup</p>
<p>Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas legislasi; b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel 	<p>Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik akan memberikan pelayanan birokrasi yang baik pula. Indikasi tata kelola pemerintah yang baik tercermin dari kinerja aparatur pemerintah sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih kuat apabila bersinergi dengan penguatan legislasi, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN.</p> <p>Refleksi tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan kepuasan kepada pelayanan publik yang dapat menggairah perkembangan ekonomi masyarakat. Regulasi pemerintah yang baik, transparan, bersih, akuntabel dapat mendorong pertumbuhan investasi dan geliat perkembangan industri nasional dan daerah, dan sekaligus membangun kepercayaan internasional. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah menjadi kebijakan yang strategis untuk dilakukan.</p>

RPJMN 2010-2014	Analisis Relevansi
<p>Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi</p> <p>Meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam menjangkau rumah tangga miskin.</p>	<p>Kemiskinan bersumber dari pengangguran dan pendapatan yang kecil. Jika ingin membrantas kemiskinan beri mereka pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia. Tidak ada teori dan program yang patut didiskusikan kecuali memberi pengangguran pekerjaan dengan pendapatan yang cukup</p>
<p>Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas legislasi; b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel 	<p>Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik akan memberikan pelayanan birokrasi yang baik pula. Indikasi tata kelola pemerintah yang baik tercermin dari kinerja aparatur pemerintah sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih kuat apabila bersinergi dengan penguatan legislasi, penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN.</p> <p>Refleksi tata kelola pemerintahan yang baik akan memberikan kepuasan kepada pelayanan publik yang dapat menggairah perkembangan ekonomi masyarakat. Regulasi pemerintah yang baik, transparan, bersih, akuntabel dapat mendorong pertumbuhan investasi dan geliat perkembangan industri nasional dan daerah, dan sekaligus membangun kepercayaan internasional. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah menjadi kebijakan yang strategis untuk dilakukan.</p>

Rekomendasi

Rekomendasi ke Pemerintah

Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan diarahkan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan meningkatkan produktivitas sektor perkebunan sawit, dan karet, serta mendorong tumbuhnya investasi terhadap industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

1. Pengembangan sentra pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan sawit, dan karet, di provinsi Bengkulu, diarahkan pada peningkatan produktivitas, peningkatan investasi sektor pertanian dan sektor perkebunan guna meningkatkan nilai tambah dengan menumbuhkembangkan industri pengolahan sehingga dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat
2. Revitalisasi pertanian dan perkebunan diarahkan pada peningkatan daya saing yang dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan sektor pertanian, dan perkebunan

Rekomendasi ke Pemerintah

1. Peningkatan produksi perikanan dan hasil laut sangat perlu dilakukan sebagai langkah upaya pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut terutama di kawasan pesisir. Pendekatan pengembangan sentra produksi dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan hasil laut, dan meningkatkan daya saing industri pengolahan hasil perikanan dan hasil laut
2. Pemberdayaan masyarakat pesisir dilakukan dengan strategi meningkatkan produktivitas dan peningkatan penghasilan nelayan.

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

Arah pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut di provinsi Bengkulu dilakukan dengan strategi :

1. Meningkatkan produksi perikanan dan hasil laut
2. Meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan industri pengolahan perikanan dan hasil laut, yang berdaya saing dan meningkatkan nilai tambah ekonomi.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir dan produktivitas nelayan

Rekomendasi ke Pemerintah

1. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional dilakukan dengan strategi mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara yang ramah lingkungan
2. Mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan

• Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

1. Dalam upaya mendukung Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi nasional, provinsi Bengkulu melakukan strategi meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dengan meningkatkan produksi batu bara yang ramah lingkungan, dan pemanfaatan air sebagai sumber energi.
2. Mengembangkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.
3. Pengendalian kerusakan lingkungan dan pengurangan dampak negatif

Rekomendasi ke Pemerintah

1. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dalam wilayah Sumatera bagian selatan dan barat dengan strategi mengembangkan Bengkulu, Palembang, dan Padang sebagai pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

Dalam rangka mengembangkan objek wisata yang terintegritas dan terpadu, provinsi Bengkulu, disarankan melakukan arah pengembangan sektor pariwisata dengan strategi :

1. Meningkatkan pengembangan objek objek wisata alam (pantai, gunung, air terjun, berburu, rafflesia, cagar alam, hutan raya, dll) dan objek wisata budaya dan sejarah (Tabot, Benteng Inggris) yang terintegritas dengan faktor pendukung pariwisata (akomodasi, transportasi, biro perjalanan, dan souvenir
2. Mengembangkan pusat wisata dalam provinsi Bengkulu dalam satu jalur wisata yang terpadu
3. Meningkatkan promosi pariwisata dan kerja sama antar daerah dalam paket wisata dengan jalur antar daerah yang terintegritas.

Rekomendasi ke Pemerintah

Pengembangan ketenalistrikan di pulau Sumatera dilakukan dengan strategi:

1. Swastanisasi kelistrikan
2. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik
3. Menyelesaikan integrasi sistem jaringan listrik Sumatera inter koneksi
4. Diversifikasi sumber energi pembangkit listrik

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

Pengembangan ketenalistrikan di provinsi Bengkulu dilakukan dengan strategi:

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air sebagai energi pembangkit listrik di kabupaten dan kecamatan
2. Mengembangkan sumber energi pembangkit listrik alternatif bagi pedesaan seperti Hidro mikro, diesel, kincir, dinamo, tenaga surya, dan lain lain
3. Swastanisasi kelistrikan

Rekomendasi ke Pemerintah

Percepatan dan efisiensi pembangunan kawasan wilayah Sumatera yang mempunyai keterkaitan domestik dilakukan dengan strategi:

1. Meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur;
2. Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut;
3. Meningkatkan kapasitas pelabuhan udara;
4. Mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

Penguatan keterkaitan domestik pembangunan pulau Sumatera yang terintegritas, provinsi Bengkulu melakukan strategi pengembangan pada :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan antar kabupaten yang bermutu
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan integritas antar moda transportasi darat, laut dan udara
3. Meningkatkan kapasitas pelabuhan laut Pulau Baii, dan kapastat pelabuhan udara Fatmawati Bengkulu, dan Bandara Mukomuko

Rekomendasi ke Pemerintah

Pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas angkatan kerja dan berdaya saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi :

1. Meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas
2. Memperluas jangkauan pelayanan kesehatan berkualitas, dan murah khususnya kepada rumah tangga miskin
3. meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja.

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi :

Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan angkatan kerja dilakukan dengan strategi :

1. Peningkatan kualitas wajib belajar 9 tahun
2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan termasuk pendidikan non formal dan Paud
3. Penguatan manajemen pendidikan dasar, dan menengah serta kejuruan
4. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah
6. Peningkatan akses pelatihan dan ketrampilan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
7. Meningkatkan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan murah
8. Perbaikan status gizi masyarakat
9. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan
10. Peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas, serta puskesmas
11. Peningkatan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan

Rekomendasi ke Pemerintah

Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi

1. Memberi pengangguran pekerjaan dengan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar
2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan ketrampilan bagi pengangguran dan rumah tangga miskin sesuai dengan talenta masing masing

Rekomendasi ke Pemerintah

Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa
2. Meningkatkan kualitas legislasi sampai ke daerah
3. Meningkatkan penegakan hukum berkeadilan, HAM, dan pemberantasan KKN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel

Rekomendasi ke Pemerintah Provinsi

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja aparatur pemerintahan provinsi yang bersih, baik, dan berwibawa serta bebas KKN
2. Meningkatkan kualitas legislasi provinsi dan kabupaten
3. Meningkatkan penegakan hukum berkeadilan, HAM, dan pemberantasan KKN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel
5. Penguatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik

3

Evaluasi Tematik

Evaluasi Tematik

Efisiensi dan Efektivitas: Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

Hasil Evaluasi Tematik

- Secara umum kondisi keuangan daerah pemerintah provinsi Bengkulu maupun kabupaten / kota sangat tergantung dari pemerintah pusat. Pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat kecil sekali, sebagian besar berasal dari dana perimbangan. Tingkat ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten / kota bahkan sangat tinggi sekali, lebih dari 90 persen sumber dana berasal dari transfer pemerintah pusat.
- Data pendapatan dan belanja daerah. hampir sebagian besar pemerintah kabupaten / kota maupun provinsi Bengkulu mengalami defisit.
- Proporsi belanja untuk peningkatan pelayanan publik porsinya tidak memadai. komposisi **belanja tidak langsung** lebih besar dari belanja langsung. Pos belanja tidak langsung yang paling besar menyerap anggaran untuk belanja Pegawai. Sementara itu dalam pos belanja langsung juga masih terdapat belanja pegawai yang menyerap hampir mencapai 10%. Melihat komposisi belanja daerah ini memang tidak banyak yang bersentuhan langsung untuk masyarakat.

- Tingginya belanja pegawai di Pemerintah Provinsi Bengkulu disebabkan karena jumlah pegawai yang cukup banyak dan terus bertambah setiap tahunnya. Jumlah pegawai yang ada sudah melebihi dari kebutuhan, hingga April tahun 2009 PNS yang bekerja di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu tercatat sebanyak 5.682 orang. Bila dilihat dari golongan kepangkatannya, sebagian besar PNS yakni 68,2 persen golongan III, golongan IV sebanyak 8,27 persen, sementara yang masih golongan I hanya 1,8 persen dan golongan II sebanyak 21,72 persen.
- Dilihat dari segi pengelolaan keuangan daerah. temuan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). hanya 3 kabupaten yang memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). yaitu pemerintah Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Kaur dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan capaian hasil opini LKPD ini berarti hampir sebagian besar pemerintah provinsi Bengkulu dan pemerintah kabupaten/kota laporan keuangannya belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel Presentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu terhadap total Pendapatan Daerah (%). Tahun 2009

No	Kabupaten/Kota	Uraian		
		PAD	Dana Perimbangan	Lain-Lain Pendapatan yang Sah
1	Bengkulu Selatan	6,00%	92,33%	1,67%
2	Rejang Lebong	4,15%	82,71%	13,14%
3	Bengkulu Utara	2,95%	91,18%	5,86%
4	Kaur	3,08%	94,54%	2,38%
5	Seluma	1,73%	93,27%	5,00%
6	Mukomuko	2,34%	82,86%	14,81%
7	Kepahiang	3,28%	80,58%	16,15%
8	Lebong	2,47%	94,38%	3,16%
9	Bengkulu Tengah	2,24%	85,12%	12,63%
10	Bengkulu	5,66%	88,45%	5,89%
11	Provinsi Bengkulu	31,47%	64,47%	4,06%

**Tabel Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu
menurut Sumbernya (ribu rupiah), Tahun 2009**

No	Kabupaten/kota	Sumber P A D				Jumlah
		Pajak	Retribusi	BUMD dan Kekayaan Daerah	Lain-Lain PAD yang Sah	
1	Bengkulu Selatan	1,771,707	8,229,033	1,900,199	10,141,087	22,042,026
2	Rejang Lebong	2,778,581	12,225,984	1,569,764	3,318,197	19,892,526
3	Bengkulu Utara	2,626,619	3,999,027	100,000	6,624,854	13,350,500
4	Kaur	1,017,018	1,488,983	1,842,081	4,664,320	9,012,402
5	Seluma	1,609,234	629,354	1,108,104	2,584,682	5,931,374
6	Mukomuko	1,980,637	2,663,309	1,833,513	2,495,551	8,973,010
7	Kepahiang	1,625,940	4,137,433	2,585,701	3,594,875	11,943,949
8	Lebong	1,151,228	901,759	2,099,115	3,536,485	7,688,587
9	Bengkulu Tengah	910,140	846,845	29,400	776,800	2,563,185
10	Kota Bengkulu	13,544,381	6,490,314	1,610,750	5,295,861	26,941,306
11	Provinsi Bengkulu	203,676,210	49,231,278	12,286,352	22,587,740	287,781,580

Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2010

	2007	2008	2009	2010
BELANJA DAERAH	763.859.321.127	1.531.005.219.133	1.099.497.687.810	1.143.966.792.576
Belanja Tidak Langsung	297.035.771.999	367.674.202.868	496.659.400.017	660.670.379.216
Belanja Pegawai	197.932.437.932	247.118.805.108	311.990.411.651	435.022.466.270
Belanja Bunga	2.000.000.000	17.515.520.000	7.540.822.919	
Belanja Subsidi	-	-	-	
Belanja Hibah	-	2.709.000.000	33.651.570.000	75.000.000.000
Belanja Bantuan Sosial Dan Lainnya	23.266.108.799	13.989.689.607	15.751.300.000	15.541.300.000
Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa	55.087.225.268	77.341.188.153	117.475.295.447	117.475.295.446
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.750.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	7.631.317.500
Belanja Tak Terduga	12.000.000.000	8.000.000.000	7.250.000.000	10.000.000.000
Belanja Langsung	466.823.549.128	1.163.331.016.265	602.838.287.793	483.296.413.360
Belanja Pegawai	60.774.057.633	60.368.163.745	55.743.863.875	47.668.525.500
Belanja Barang Dan Jasa	164.614.442.641	529.578.230.910	241.633.056.652	257.070.048.915
Belanja modal	241.435.048.854	573.384.621.610	305.461.367.266	178.557.838.945

Kesimpulan

1. Berdasarkan indikator Reformasi birokrasi tata kelola di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa kinerja birokrasi pemerintahan di provinsi Bengkulu mengalami perbaikan/peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
2. Dalam bidang pendidikan berdasarkan indikator kinerja menunjukkan bahwa kualitas dan akses pendidikan mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, demikian juga halnya dalam bidang kesehatan.
3. Dalam bidang penanggulangan kemiskinan dan pengangguran provinsi Bengkulu dapat dikatakan belum optimal.
4. Jumlah produksi pertanian dari tahun 2005 s.d 2011 cenderung meningkatkan hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penyuluh pertanian yang ada di provinsi Bengkulu.
5. Dari data indikator infrastruktur dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar jalan nasional di daerah ini dalam kondisi yang tidak baik. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan provinsi maupun jalan kabupaten atau kota. Pada tahun 2010 kondisi kualitas panjang jaringan jalan dalam kondisi baik meningkat menjadi 52,22%, sedang 32,23%, rusak ringan: 8,33% dan rusak berat: 7,22%).

6. Perkembangan kredit yang diberikan kepada sektor UMKM Di Provinsi Bengkulu sampai dengan bulan Agustus Tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 5,09%. Alokasi kredit yang diberikan kepada sektor UMKM umumnya paling banyak digunakan untuk modal kerja dengan rata-rata lebih dari 80%. Sementara pada bidang perkembangan investasi di provinsi Bengkulu data yang dipublikasikan oleh BKPMMD menunjukkan bahwa perkembangan jumlah investor dan nilai investasi yang ditanamkan di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Jumlah tabungan masyarakat meningkat,
7. Pada indikator dibidang energi perkembangan *rasio elektrifikasi* bergerak secara *gradual*. Dilihat perkembangan *Rasio Elektrifikasi* dari tahun 2009 s.d 2010 lebih dari tiga perempat rumah tangga memperoleh aliran listrik (menjadi pelanggan listrik) yaitu sekitar 77,07% pada tahun 2009, meningkat menjadi 77,72% pada tahun 2010. Apabila dirinci menurut tempat tinggal, daerah perkotaan lebih tinggi rasionya, sedangkan perdesaan hanya 66,57%, selanjutnya pada tahun 2010, perkotaan sedikit turun menjadi 96,27 dan perdesaan meningkat menjadi 69,56%. Rendahnya rasio elektrifikasi di perdesaan karena ketidakmampuan rumah tangga yang umumnya kebanyakan rumah tangga miskin untuk membiayai pemasangan aliran listrik dimana biaya sangat tinggi.

8. Persentase reboisasi hutan terhadap lahan kritis dari tahun 2006 s.d 2011 mengalami peningkatan secara *gradual*, bahkan sempat terjadi penurunan dari tahun 2006 s.d 2007. Perubahan secara *gradual* tidak terlalu signifikan, karena tingkat kesadaran masyarakat akan konservasi hutan relatif masih rendah.
9. Untuk indikator pembentukan BPBD provinsi Bengkulu dimulai pada akhir tahun 2006. Oleh karena itu BPBD Kota Bengkulu mulai berfungsi sejak tahun 2009 kendati masih berjalan sekitar 80%. Mulai tahun 2010 hingga saat ini (tahun 2011) BPBD Kota Bengkulu dapat menjalankan fungsinya secara lebih optimal.
10. Pada bidang kesejahteraan ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Pada tahun 2009 angka indeks Gini provinsi Bengkulu sebesar 0,30 pada tahun 2010 angka Gini ratio Bengkulu meningkat sangat signifikan menjadi 0,37 yang menempatkan provinsi Bengkulu pada urutan tertinggi di pulau Sumatera. Dan Provinsi Bengkulu merupakan satu-satunya provinsi yang terbelakang di Pulau Sumatera. Dari 10 kabupaten/kota, 6 kabupaten diantaranya termasuk dalam kategori daerah tertinggal.
11. Pendapatan perkapita mengalami kenaikan, namun masih kecil dan nilainya setengah dari perkapita nasional.
12. Data statistik menunjukkan Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yang sejak tahun 2005 s.d 2009, yaitu 3,20% pada tahun 2005, turun menjadi 1,56% tahun 2006 dan menjadi 0,63% tahun 2007, 0,43% tahun 2008 dan 0,02% tahun 2009.

13. Berdasarkan data persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dapat dikatakan bahwa upaya mewujudkan kehidupan yang aman dan damai sudah memuaskan. Pemerintah daerah sudah memperlihatkan komitmen yang tinggi, antara lain menambah satuan kerja pelayanan hukum dengan dibentuknya institusi kepolisian kecamatan di setiap daerah kabupaten pemekaran, dibentuknya institusi Kejaksaan dan pengadilan di setiap kabupaten pemekaran, sehingga makin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.
14. Dilihat dari persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional tahun 2010 tuntas 100%, ini menunjukkan bahwa aparat hukum khususnya, dan pemerintah daerah umumnya sudah siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya jenis kejahatan yang bersifat transnasional sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan

Rekomendasi

- Pemerintah:
Reformulasi transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan karakteristik daerah.
- Pemerintah Provinsi:
Efisiensi dan Efektifitas penggunaan dana oleh pemerintah provinsi dan kabupaten / kota

Optimalisasi pemungutan PAD
Pengehentian penerimaan PNS baru (zero growth dalam penerimaan PNS)

TERIMA KASIH